



Jogja Bersiap Hadapi New Normal

JAKARTA-
Pemerintah
Kota Jogja
menyatakan bersiap
melaksanakan
pengurangan
pembatasan sosial
atau biasa disebut
new normal.

Muhammad Nadhir Attamimi
nadhir@harianjogja.com

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengungkapkan saat ini Pemkot menyiapkan langkah-langkah menghadapi *new normal*. Untuk mencapai kehidupan baru tersebut, ia memastikan masyarakat harus ikut terlibat agar semua sektor cepat bangkit, baik sosial maupun ekonomi. "Kita harus menjadikan momentum kebangkitan ini

► Pengurangan pembatasan sosial tidak dapat diartikan sebagai sebuah pelonggaran.

► IDI meminta pemerintah hati-hati dalam membuat aturan.

untuk membangun Jogja dengan protokol yang baru," kata Heroe, yang juga menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Jogja ini, Minggu (17/5).

Heroe menjelaskan *new normal* di Jogja nantinya harus dikuatkan dengan sejumlah protokol kesehatan di masing-masing bidang dan sektor.

► Halaman 10

Jogja Bersiap...

"Artinya, ketika masa pandemi Covid-19 sudah mulai reda, kita belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara normal seperti sebelum Covid-19. Kita masih memerlukan waktu untuk menjalani masa transisi, terutama dalam upaya untuk mencegah terjadi penularan baru atau muncul kasus baru," ungkapnya.

Ia mencontohkan sejumlah aktivitas di masa pandemi yang perlu ditingkatkan ketika menjalani fase baru di antaranya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan menyeduhkan alat cuci tangan dan berbagai cara transaksi di masa mulai pemesanan lewat *whatsapp*, aplikasi *online*, melalui pelatuk usaha di Kota Jogja.

Bahkan, lanjut dia, kegiatan belajar mengajar hingga rapat yang dilakukan saat masa pandemi, bisa dilanjutkan saat fase new normal nantinya. Terpenting, semua itu bisa meningkatkan rasa gotong-royong dan keuletan hingga saling peduli, maka bisa diteruskan.

"Saat ini sudah mulai kita lakukan seperti *social* dan *physical distancing*, membatasi kerumunan dan lainnya yang sudah kita lakukan dengan kreativitas untuk mengatasi permasalahan, agar kondisi sosial ekonomi tetap berjalan tetapi tetap menegakkan protokol Covid-19," ujarnya.

Namun, untuk menjalani fase kehidupan normal lebih jauh lagi, Heroe mengungkapkan akan menunggu kondisi mereda.

"Tetapi untuk ke depan, ya masih menunggu kondisi mereda, cenderung stabil dan turun, tidak ditemukan penambahan kasus. Maka saat itulah kita siap-siap untuk menjalankan fase normal baru," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengkampanyekan untuk hidup berdampingan dengan virus Corona baru penyebab Covid-19 selama vaksin belum ditemukan.

Menurut Jokowi hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan pesimistis. Justru itu menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat atau yang disebut *new normal*. Presiden Jokowi ingin agar masyarakat kembali produktif, artinya bisa bisa kembali beraktivitas tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Protokol kesehatan ketat yang harus dipatuhi antara lain menjaga jarak aman (*social distancing*), selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengenakan masker, serta membatasi perjalanan yang tidak perlu.

Jalur Penerbangan

Menyebut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menyatakan pengurangan pembatasan sosial bakal diujicobakan di jalur penerbangan.

Ia menekankan pengurangan pembatasan sosial tidak dapat diartikan sebagai sebuah pelonggaran. Menurutnya, meskipun pembatasan sosial dikurangi, aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan, bahkan diperketat. "Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," ujar Muhadjir dikutip dalam laman resmi *kemendikompink.go.id*, Minggu.

Muhadjir menambahkan pengurangan pembatasan sosial, terutama yang dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga Minggu kemarin, sudah cukup baik. Hanya, kata dia, ada sejumlah aturan yang masih harus diperketat serta dilakukan sejumlah perbaikan. Semisal, ketersediaan jumlah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang tidak hanya memastikan kesehatan para calon penumpang tetapi juga seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan perjalanan lintas wilayah melalui jalur udara. "Hal-hal seperti ini yang harus kami evaluasi sebelum kami membuka lagi pembatasan sosial pada sektor-sektor yang lain. Protokolnya harus dipersiapkan sungguh-sungguh dan dihitung segala konsekuensinya sehingga tidak terjadi kasus seperti hari pertama dibukanya perjalanan di bandara."

Hati-Hati

IDI meminta pemerintah hati-hati dalam membuat aturan, termasuk pelonggaran di bidang transportasi. "Saya juga enggak setuju dilonggarkan, pesawat terbang semuanya diperbolehkan, tetapi pertimbangan pemerintah juga tidak mudah, artinya kalau diteruskan PSBB secara mutlak

keadaannya ekonomi ambruk, ekonomi ambruk nanti bagaimana kalau dilonggarkan, nanti pada tertular meninggal jadi kaya buah simalakama. Inilah menurut saya, apapun kebijakan itu PSBB yang masih berlaku harus ketat," ujar Ketua Dewan Pertimbangan IDI Zubairi Djoerban, Minggu.

Menurut Zubairi, jika pemerintah ingin melakukan pelonggaran pembatasan sosial di transportasi harus mempersiapkan aturan yang ketat. Pemerintah juga harus memikirkan langkah ke depannya agar tidak ada lagi penyebaran Covid-19 saat aturan ini mulai berlaku. "Sebetulnya kalau bikin peraturan, oke sekarang dibebaskan bus, pesawat, kereta api, maka yang penting peraturan pelaksanaannya, jadi begitu membuat peraturan yang bisa menyebabkan kerumunan harus diantisipasi," katanya.

Dia pun mencontohkan semisal Bandara Soekarno Hatta (Soetta), agar tidak penularan ketika dilonggarkan pembatasan sosial transportasi, pemerintah harus menyiapkan sosialisasi bahaya penyebaran Corona dalam bandara. Dia juga mengusulkan agar ada *rapid test* bagi masyarakat yang sedang berkerumun di tempat transportasi. "Misalnya Soetta harus diberitahu, disiapkan kemudian masyarakat juga disiapkan, dan *rapid test* justru suatu kesempatan karena masyarakat sudah terlanjur kumpul, ya sudah *rapid test* sekalian, jadi mestinya *rapid test* dikerjakan di semua bandara, atau terminal bus, stasiun kereta api," jelasnya.

Senada disampaikan ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani. Laura mengatakan kurva kasus Corona di Indonesia belum melandai.

Laura mengatakan uji coba pengurangan pembatasan sosial di sektor transportasi itu harus diperjelas. Dia tak ingin insiden penumpukan penumpang di Bandara Soetta beberapa waktu lalu terulang. "Harus diperjelas kemudian pengujian *screening* transportasi, entah itu di stasiun entah itu di bandara, itu juga harus diperjelas seperti apa. Contohnya kemarin di Bandara Soekarno-Hatta itu kan juga akhirnya jadi penumpukan calon penumpang," ujar Laura. *LIRI/Dewa*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005